

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia mempunyai luas wilayah 6,32 juta km² dan 17.504 pulau, sehingga Indonesia menjadi negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia juga dikenal sebagai negara agraris yang memiliki lahan pertanian sangat luas. Wilayah perkotaan di seluruh dunia mengalami perkembangan yang semakin pesat. Diperkirakan sebanyak 56,7% penduduk Indonesia yang menempati wilayah perkotaan pada tahun 2020 dan persentase tersebut diprediksi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) akan terus meningkat menjadi 66,6% pada tahun 2035. *World Bank* juga memperkirakan sebanyak 220 juta penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan pada tahun 2045, dan jumlah ini setara dengan 70% dari total populasi di tanah air. Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan bahwa mayoritas masyarakat pada saat ini tinggal di wilayah perkotaan dan angkanya pun diperkirakan akan terus meningkat hingga tiga miliar pada tahun 2050. Pertumbuhan ekonomi dan Perkembangan pembangunan yang pesat di daerah perkotaan semakin meningkatkan kebutuhan lahan.

Permasalahan yang terjadi saat ini adalah semakin minimnya lahan pertanian. Permukiman di daerah perkotaan memiliki lahan pekarangan yang terbatas, sehingga pertanian perkotaan menjadi solusi untuk mengatasi

keterbatasan lahan tersebut (Santoso dan Widya, 2014). Pertanian perkotaan saat ini menjadi alternatif di kawasan perkotaan untuk memanfaatkan lahan pertanian yang terbatas. Pertanian perkotaan menjadi alternatif untuk menyikapi berkurangnya luas lahan pertanian dan menjaga ketahanan pangan bagi masyarakat perkotaan. Bakker, dkk (2000) menyatakan bahwa pertanian perkotaan menjadi alternatif untuk menjaga ketahanan pangan di perkotaan. Definisi tersebut sejalan dengan pendapat yang diungkapkan oleh Haletky (2006), bahwa pertanian perkotaan menjadi aspek penting dalam pembangunan sistem pangan masyarakat yang berkelanjutan. Pertanian perkotaan jika dijalankan dengan baik dapat mengentaskan persoalan kerawanan pangan dan juga mengatasi permasalahan keterbatasan lahan pertanian. Pertanian perkotaan dapat didefinisikan sebagai sebuah kegiatan, yang berkaitan dengan produksi, distribusi, serta konsumsi dari bahan pangan atau hasil pertanian lain yang dilakukan di lingkungan perkotaan (Setiawan, 2002).

Kegiatan pertanian perkotaan mulai dari menanam, panen, dan memasarkan hasil panen, dilakukan dengan cara memanfaatkan lahan yang tersedia di perkotaan. Kondisi serupa juga terjadi di Kota Semarang di mana pembangunan telah mengurangi jumlah lahan pertanian.

Tabel 1. 1

Perkembangan Luas Sawah, Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk Kota Semarang Tahun 2011-2022

No	Tahun	Luas Sawah (Ha)	Luas Wilayah	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk
1.	2012	3,827	373,70	1,559,198.00	4,172.00
2.	2013	3,817	373,70	1,572,105.00	4,206.00
3.	2014	3,790	373,70	1,559,198.00	4,172.00
4.	2015	3,707	373,70	1,595,187.00	4,268.69
5.	2016	3,701	373,70	1,602,717.00	4,289.00
6.	2017	2,434.02	373,70	1,753,092.00	4,628.00
7.	2018	2,421.36	373,70	1,786,114.00	4,780.00
8.	2019	2,396.54	373,70	1,814,110.00	4,855.00
9.	2020	2,388.54	373,78	1,653,524.00	4,423.79
10.	2021	2,396.54	373,78	1,656,564.00	4,431.92
11.	2022	2,216.54	373,78	1,659,975.00	4,441.05

Sumber : Dinas Pertanian Kota Semarang (Pertanian dalam Angka 2022)

Data tabel 1.1 menyatakan bahwa terdapat peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya. Hal ini berarti juga terdapat penurunan penggunaan luas lahan pertanian. Pemerintah Kota Semarang menerbitkan Peraturan Walikota mengenai gerakan untuk melakukan pemberdayaan pertanian perkotaan di wilayah Kota Semarang sebagai salah satu upaya penghijauan. Penggunaan lahan sawah dari tahun 2011 ke 2022 terbukti semakin mengecil. Dari tabel 1.1 membuktikan bahwa semakin meningkatnya jumlah penduduk membuat wilayah pertanian semakin sempit. Alih fungsi lahan akhirnya terjadi dari lahan pertanian ke non pertanian.

Sudah berapa banyak lahan pertanian hilang dan dibangun menjadi pemukiman, industri, atau bangunan kota lainnya. Hal ini juga mengakibatkan petani kehilangan sumber pendapatannya. Alih fungsi lahan pertanian akan berdampak luas, yaitu seperti terjadinya peralihan struktur ekonomi dari pertanian menjadi industri. Dilihat dari segi ekonomi hal ini dapat mengurangi ketahanan pangan bagi produksi pertanian. Para petani sendiri akan kehilangan pekerjaannya sehingga daya beli menurun karena belum tentu petani mendapatkan pekerjaan baru yang lebih baik. Dilihat dari segi lingkungan, alih fungsi lahan pertanian juga menghilangkan daerah resapan air yang berfungsi untuk mengurangi banjir dan cadangan air tanah. Alih fungsi lahan pertanian merupakan hal yang serius sebab konversi lahan sulit untuk dihindari dan menimbulkan dampak yang sangat besar dan bersifat permanen. Lahan di wilayah Kota Semarang jika ditinjau berdasarkan jenis penggunaannya dibagi menjadi lahan pertanian dengan penggunaan sebagai sawah, lahan pertanian bukan diperuntukan sebagai sawah, serta lahan bukan diperuntukan sebagai lahan pertanian. Lahan pertanian yang ada di wilayah Kota Semarang pada tahun 2019 tercatat di angka 2.396 hektar dan yang tidak diperuntukan untuk sawah tercatat di angka 34.972 Ha.

Sesuai Bab I Pasal 3 Perwal Kota Semarang No. 24 Tahun 2021, berbagai upaya sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang dalam rangka pembudayaan pertanian perkotaan yang bertujuan untuk :

- a. Pemberdayaan yang ditujukan kepada masyarakat untuk melakukan penguatan ketahanan pangan dan gizi Masyarakat Kota Semarang.
- b. Melakukan pemanfaatan lahan dan/atau ruang.
- c. Terciptanya lingkungan di wilayah Kota Semarang yang sehat.
- d. Melakukan peningkatan penghijauan dan melakukan pemanfaatan terhadap limbah yang diproduksi oleh rumah tangga.

Dari tujuan di atas, diharapkan masyarakat di Kota Semarang dapat memanfaatkan lahan dengan bertani dan juga memperkuat pertahanan ketahanan pangan dan gizi. Sesuai dengan Bab II Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Perwal Kota Semarang No. 24 Tahun 2021, Pemerintah berupaya untuk melakukan berbagai gerakan pemberdayaan yang ditujukan kepada masyarakat berkaitan dengan pertanian perkotaan dengan memberikan ketersediaan lahan serta ikut berpartisipasi aktif dalam menjalankan pertanian perkotaan di lingkungan instansinya masing – masing. Peranan pemerintah dalam berpartisipasi secara aktif berkaitan dengan gerakan pemberdayaan ini diatur sebagaimana ayat (1), yaitu :

- a. Memberikan ketersediaan ruang/lahan yang digunakan untuk melakukan program pertanian perkotaan;
- b. Menjalankan program pertanian perkotaan;
- c. Memfasilitasi pertanian perkotaan; dan/atau
- d. Menjalankan peninjauan serta evaluasi dari keberjalanan pertanian perkotaan.

Masyarakat di Kota Semarang bisa dibilang belum bisa beradaptasi dengan kegiatan bercocok tanam di lingkungan perkotaan. *Urban farming* atau dikenal dengan pertanian perkotaan memberikan banyak manfaat, contohnya di bidang ekonomi dapat membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, menurunkan angka kemiskinan, serta menunjang peningkatan produktivitas yang ada di wilayah kota (Setiawan, 2011). Kegiatan *Urban Farming* bermanfaat untuk melakukan pengolahan dengan lahan sekecil apapun menjadi lahan yang produktif. Permukiman dan perkotaan saat ini membutuhkan *urban farming*, dapat dilihat dari kondisi sepanjang jalan yang hampir tidak memiliki lahan sawah. Bangunan beton dan aspal menandakan adanya transformasi dari pedesaan menjadi perkotaan yang modern dan berkembang pesat. Hal ini seperti yang terjadi pada beberapa Kecamatan yang terdapat di Kota Semarang. Kecamatan Banyumanik menempati posisi ke lima dengan jumlah penduduk terbanyak di Kota Semarang. Jumlah penduduk yang bertambah dan kebutuhan akan lahan yang meningkat menjadi pertanyaan seberapa luas lahan pertanian di Kecamatan Banyumanik. Berikut ini adalah penjelasan penggunaan lahan sawah di Kecamatan Banyumanik.

Tabel 1. 2

Luas Penggunaan Lahan Sawah di Kecamatan Banyumanik Tahun 2012-2022

Tahun	Luas Penggunaan Lahan Sawah Kecamatan Banyumanik
2012	96,00
2013	96,00
2014	96,00
2015	57,00
2016	57,00
2017	70,00
2018	70,00
2019	41,75
2020	41,75
2021	41,00
2022	41,75

Sumber : BPS Kota Semarang

Lahan pertanian di Kecamatan Banyumanik mengalami penurunan karena terjadi alih fungsi lahan untuk pemukiman. Hal ini juga sesuai dengan data dari Badan Pusat Statistik Kota Semarang dalam buku “Kecamatan Banyumanik dalam angka 2023” di mana jumlah penduduk Kecamatan Banyumanik pada tahun 2022 tercatat sebanyak 143.953 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk yang menunjukkan meningkat. Jumlah penduduk yang meningkat setiap tahunnya mengakibatkan kebutuhan lahan di Kecamatan Banyumanik juga semakin meningkat. Lahan yang digunakan untuk permukiman dan bangunan lainnya

seperti *coffee shop*, rumah sakit, dan fasilitas lainnya semakin banyak, sedangkan lahan pertanian semakin menyempit.

Keterbatasan lahan akhirnya memunculkan opsi bertani dengan sistem hidroponik (*Urban Farming*). Menurut Daud et al (2018), hidroponik adalah salah satu alternatif sistem bercocok tanam di wilayah perkotaan dengan kondisi lahan sempit yang padat penduduk. Sistem hidroponik lebih efisien dibandingkan dengan budidaya menggunakan tanah. Sistem ini cocok diterapkan pada daerah dengan keterbatasan sumber air dan lahan. Kota Semarang mengencarkan *urban farming* di seluruh Kecamatan, dan salah satu Kecamatan yang cukup berpotensi adalah Kecamatan Banyumanik. Berikut berita seputar Kecamatan Banyumanik yang cukup berpotensi dalam melaksanakan *urban farming*.

Gambar 1. 1

Kelurahan Banyumanik Dorong UMKM dan Urban Farming untuk Tingkatkan Kesejahteraan Warga

Lurah Hebat: Kelurahan Banyumanik Dorong UMKM dan Urban Farming untuk Tingkatkan Kesejahteraan Warga

Jati Prihatnomo - Rabu, 25 Oktober 2023 | 18:39 WIB



Sumber : Suara Merdeka, 2023

Berita di atas menjelaskan mengenai Kelurahan Banyumanik yang mendorong perekonomian warga dengan cara mengembangkan kegiatan UMKM serta *urban farming*. Lurah Banyumanik juga mengatakan bahwa pihaknya mendorong kegiatan *urban farming* untuk ketahanan pangan. Hasil dari *urban farming* memang belum bisa untuk didistribusikan, tetapi setidaknya bisa untuk memenuhi kebutuhan sendiri.

Gambar 1. 2

Pemenang Lomba Pertanian Perkotaan Kota Semarang Tahun 2019



Sumber : Dokumentasi yang diolah peneliti

Gambar 1.2 di atas adalah Kelompok Tani Dahlia dari Kecamatan Banyumanik yang memenangkan lomba pertanian perkotaan tingkat Kota Semarang pada tahun 2019. Kelompok Tani Dahlia adalah kelompok tani yang bisa dikatakan paling maju dibandingkan kelompok tani lainnya. Sebagai pemenang, Kelompok Tani Dahlia mendapatkan hadiah uang pembinaan sebanyak Rp. 4.000.000,00 yang mereka gunakan untuk kebutuhan kelompok tani mereka.

Pertanian yang sudah dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Banyumanik tidak hanya menanam padi. Produk pertanian yang dibudidayakan dan diproduksi seperti tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan sayuran. Pada tahun 2021, jumlah tanaman sayuran, produksi buah-buahan dan tanaman *biofarmaka* di

Kecamatan Banyumanik menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini karena pembangunan yang semakin meluas sehingga lahan pertanian semakin minim. Lahan pertanian yang semakin minim tidak menjadi hambatan karena Kecamatan Banyumanik masuk ke dalam 5 Kecamatan dengan Kelompok Tani terbanyak, yaitu 33 kelompok tani. Pemerintah Kota Semarang memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Gerakan Pembudayaan Pertanian Perkotaan di Kota Semarang melalui Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 24 Tahun 2021. Keberhasilan Kecamatan Banyumanik dalam melaksanakan *urban farming* membuat peneliti tertarik untuk melihat bagaimana implementasi Peraturan Walikota Semarang No. 24 Tahun 2021.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Rendahnya presentase luas lahan pertanian.
2. Kecamatan Banyumanik merupakan salah satu wilayah yang berhasil dalam gerakan pembudayaan *urban farming*.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang berhubungan dengan Implementasi Peraturan Walikota No. 24 Tahun 2021 Tentang Gerakan Pembudayaan Pertanian Perkotaan di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang adalah :

1. Bagaimana implementasi Gerakan Pembudayaan Pertanian Perkotaan di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang?.

2. Apa faktor pendorong dalam keberhasilan implementasi Gerakan Pembudayaan Pertanian Perkotaan di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang?.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah rumusan kalimat yang menunjukkan hasil dan sesuatu yang diperoleh setelah penelitian selesai. Dalam hal ini, tujuan penelitian berdasarkan perumusan masalah di atas adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Gerakan Pembudayaan Pertanian Perkotaan di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendorong dalam implementasi Gerakan Pembudayaan Pertanian Perkotaan di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang.

1.5 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian merupakan dampak pencapaian dari sebuah tujuan. Melalui urutan serta pembahasan yang ada dalam penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak, yaitu :

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Diharapkan penelitian ini bisa menjadi sumber referensi bagi penelitian di masa mendatang dan dapat berkontribusi dalam pengembangan bidang keilmuan administrasi publik, khususnya dalam bidang pertanian.

1.5.2 Kegunaan Praktis

a) Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menjadi sarana pembelajaran bagi peneliti. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai acuan dalam metode penelitian dan sebagai pembanding dengan penelitian-penelitian selanjutnya.

b) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai informasi mengenai Implementasi Peraturan Walikota Semarang tentang Gerakan Pemberdayaan Pertanian Perkotaan di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang.

c) Bagi Pemerintah

Penelitian ini bermanfaat untuk peningkatan penyelenggaraan upaya gerakan pembudayaan pertanian perkotaan dan sebagai tolok ukur untuk penyelenggaraan upaya penghijauan selanjutnya supaya dapat mencapai tujuan dari Gerakan Pembudayaan Pertanian Perkotaan yang tercantum dalam Peraturan Walikota No. 24 Tahun 2021.

1. 6 Kajian Pustaka

Konsep dan teori dasar yang digunakan sebagai rujukan tentunya bertujuan untuk mempermudah proses pemahaman terhadap permasalahan penelitian. Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini maka konsep implementasi digunakan untuk mengetahui apakah peraturan yang ada sudah diimplementasikan dengan baik. Penelitian terdahulu adalah berbagai penelitian yang sudah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya di mana penelitian terdahulu merupakan upaya para peneliti yang digunakan untuk mencari rujukan dan perbandingan yang dapat dimanfaatkan dalam melakukan penelitian selanjutnya. Berikut ini merupakan penelitian terdahulu serta pembahasan secara rinci terkait konsep dan teori dasar yang akan digunakan dalam penelitian ini.

1.6.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengacu dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan membahas terkait pertanian perkotaan. Literatur penelitian terdahulu yang berkaitan, yaitu :

“Pemanfaatan Pertanian Secara Hidroponik Untuk Mengatasi Keterbatasan Lahan Pertanian di Daerah Perkotaan” oleh Sudarmo (2018) dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui solusi dari berkurangnya pasokan *supply* sayuran di Kelurahan Cinangka, Kota Depok melalui metode hidroponik di tengah keterbatasan lahan pertanian dalam wilayah ini. Hasil temuan penelitian

menjelaskan bahwa sebagian besar masyarakat di Kelurahan Cinangka khususnya yang aktif dalam posyandu memahami berbagai teknik penanaman dengan metode hidroponik. Semakin banyak masyarakat yang memahami metode ini nantinya dapat menyebarluaskan kepada masyarakat lain sehingga pasokan *supply* sayuran dapat terjaga khususnya di Kelurahan Cinangka.

“Peran Pertanian Perkotaan dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan (Studi Kasus: Pertanian Aquaponik di Kota Semarang)” oleh L. Wahdah & Maryono (2018) dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisa data karakteristik pertanian perkotaan dan peran pertanian perkotaan dalam menunjang pembangunan kota secara berkelanjutan. Hasil dari riset ini meliputi karakteristik petani pada daerah perkotaan, yaitu antara laki-laki berusia sekitar 30-50 tahun dan memiliki anggota keluarga sebanyak empat orang atau lebih. Kegiatan pertanian perkotaan tidak membutuhkan lahan yang luas, status kepemilikan tanah, pertanian vertikal, dan kerap digunakan untuk keperluan pribadi. Apabila pertanian di wilayah perkotaan dapat memberikan manfaat seperti pendapatan tambahan, mengoptimalkan penggunaan lahan kosong, mengurangi polusi udara, maka pertanian bisa membantu mendukung pembangunan berkelanjutan.

“Kajian Potensi Pengembangan Pertanian Perkotaan di Kota Semarang” oleh Handayani dkk (2018) dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Riset ini bertujuan untuk mengkolaborasi peluang pertanian perkotaan di Kota

Semarang, serta menganalisa sektor-sektor pembangunan yang dapat memberikan manfaat secara timbal balik dari perkembangan pertanian perkotaan tersebut. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa aktivitas pertanian perkotaan tidak hanya dikembangkan untuk penyediaan pangan, namun juga dibutuhkan karena memiliki manfaat lain yang dapat diperoleh. Berdasarkan analisis manfaat lain (*co-benefit*), diketahui bahwa manfaat yang diterima dan atau diberikan pada tiap kelompok bisa juga berbeda sesuai dengan karakteristik kelompoknya. Namun jika ditinjau secara keseluruhan, manfaat lain yang dapat diperoleh terutama manfaat yang berkorelasi (lebih asri dan lebih teduh) dan manfaat sosial (sarana bersosialisasi dengan tetangga sekitar).

“Pengembangan Sistem Pertanian Hidroponik pada Lahan Sempit Komplek Perumahan” oleh Lestari dkk (2020) dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan penanaman hidroponik dengan menggunakan lahan sempit di perkotaan kemudian melakukan analisis efisiensi kegiatan pertanian tersebut. Penelitian ini memberikan informasi mengenai berbagai langkah yang digunakan dalam melakukan pertanian perkotaan dengan sistem hidroponik serta memberikan gambaran manfaat dari sistem yang sudah dibentuk tersebut. Manfaat dari adanya sistem hidroponik tersebut memberikan keuntungan berupa penghasilan Rp. 495.000 – Rp. 1.485.000 setiap kali panen. Sistem hidroponik ini juga membantu memproduksi makanan yang sehat dan segar. Hal ini membuktikan bahwa sistem ini sangat efektif dan efisien dalam mengembangkan pertanian di

lahan yang sempit dan mengurangi polusi yang ada serta menambah penghasilan rumah tangga di wilayah tersebut.

“Effectiveness of Urban Farming Policies and Economic Heroes in Poverty Reduction in the City of Surabaya” oleh Kriswibowo dkk (2020) dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program *urban farming* di Kota Surabaya sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat melalui UMKM. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa program usulan Pemerintah Kota Surabaya tidak sepenuhnya efektif dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Salah satu contoh program yang kurang efektif dalam pengentasan kemiskinan adalah *urban farming*. Hal tersebut terjadi karena ketidaksesuaian program dengan sasaran peserta program, tidak tercapainya tujuan kegiatan, serta monitoring program yang belum maksimal, sedangkan kegiatan Pahlawan Ekonomi berupa UMKM dapat berjalan efektif dalam penanggulangan angka kemiskinan namun diperlukan kerjasama serta partisipasi seluruh komponen bangsa terutama lembaga keuangan agar dapat mengapung dengan baik.

“Empowerment of Urban Farming Community to Improve Food Security in Gresik” oleh Indah dkk (2020) dengan menggunakan metode penelitian *Structural Equation Modeling Partial Least Square (SEM-PLS)*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran komunitas *urban farming* pemberdayaan untuk meningkatkan ketahanan pangan.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pemberdayaan memiliki peranan penting untuk mencapai ketahanan pangan. Hal ini dapat dilihat bahwa indikator pemberdayaan anggota masyarakat *urban farming*, yaitu kapasitas, kewenangan, dan pemberdayaan yang memiliki pengaruh sebesar 97% dalam meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga dan anggota komunitas pertanian perkotaan di Desa Gending, Kabupaten Gresik.

“Analisa Keberhasilan Implementasi Kegiatan Pertanian Perkotaan di Kelurahan Lakarsantri” oleh Pradana & Nurharjadmo (2021) dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian tersebut sukses menjadi salah satu faktor keberhasilan kegiatan *urban farming* di Kelurahan Lakarsantri. Hasil penelitian ini menjelaskan akan pentingnya pelaksanaan *urban farming* yang ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan program ini berlangsung di bawah naungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya dengan orientasi utama yakni peningkatan pendapatan sektor rumah tangga. Dalam penelitian ini, keberhasilan program *urban farming* dapat dirinci dalam teori Edward III yang memiliki empat indikator yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan juga struktur birokrasi. Indikator tersebut saling berkesinambungan dan dapat dikatakan berhasil serta tidak terdapat hambatan yang begitu berarti.

“Pemanfaatan Lahan Pekarangan sebagai Sentra Pertanian Perkotaan (Urban Farming) secara Hidroponik” oleh Alridiwirsa dkk (2021) dengan menggunakan metode penelitian pengabdian masyarakat. Penelitian ini

bertujuan untuk menerapkan pemanfaatan lahan perkotaan sebagai sentra pertanian perkotaan melalui pola penanaman hidroponik dan edukasi langsung mengenai penerapan *urban farming*. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa peserta program PKPM pada umumnya adalah masyarakat dengan usia yang tidak muda lagi dan tidak memiliki pendidikan yang tinggi, namun mempunyai intensi untuk mengikuti kegiatan pengembangan teknologi vertikultur, dengan tingkat keseriusan yang tinggi. Peserta kegiatan PKPM mendapatkan banyak manfaat untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, mengasah ketrampilan, dan mengkokohkan niat dalam pemanfaatan area halaman rumah masing-masing menjadi lebih produktif. Meskipun teknologi vertikultur masih terasa asing bagi ibu-ibu sebagai peserta program, namun peserta tidak menunjukkan ekspresi kesulitan selama keberjalanan program penerapan teknologi vertikultur.

“Implementasi Program Kampung Iklim: Urban Farming melalui Hidroponik dan Budikdamber di Kelurahan Sialang Palembang” oleh Marleni (2021) dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan program kampung iklim melalui pengembangan hidroponik dan memberikan edukasi langsung mengenai penerapan urban farming. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Kota Palembang secara umum memiliki potensi yang besar dalam menerapkan Urban Farming melalui pengembangan hidroponik dan budidaya ikan dalam ember (Budikdamber), hanya saja masih belum cukup edukasi dan motivasi

sehingga masyarakat tidak mengetahui teknis dan manfaat dari Hidroponik dan Budikdamber.

“Urban Farming: Kegiatan Pemanfaatan Lingkungan untuk Pengembangan Pertanian Perkotaan di Kota Semarang” oleh Maulana dkk (2022) dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengembangkan pertanian perkotaan (*urban farming*) di Kota Semarang dan membantu menunjang produktivitas masyarakat. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa perkembangan aktivitas pertanian perkotaan tidak semata disebabkan oleh keterbatasan lahan yang ada. Pertanian perkotaan ini dapat dirasakan manfaatnya seperti membantu ketahanan pangan, sebagai sarana edukasi bagi masyarakat, pelestarian lingkungan, peningkatan kualitas udara, membuka peluang usaha, dan bisa juga menjadi aktivitas ekonomi bagi masyarakat yang belum memiliki pekerjaan.

1.6.2 Administrasi Publik

Administrasi Publik (*Public Administration*) atau dikenal juga sebagai administrasi negara, merupakan salah satu hal vital dalam kegiatan pemerintahan. Administrasi Publik merupakan lingkup kecil dalam ilmu administrasi yang berkaitan dengan alur politik, seperti dalam perumusan kebijakan negara. Keilmuan Administrasi Publik sudah menjadi bagian penting dalam pengelolaan pemerintahan. Administrasi Publik sangat mempengaruhi tingkat perumusan

kebijakan karena fungsinya dalam mencapai tujuan program yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan politik (Kasim 1994).

Menurut Gordon (1982) (dalam Kasim 1994), Administrasi publik mengambil peranan vital dalam melakukan perencanaan berbagai kebijakan, kemudian penerapan/implementasi kebijakan tersebut, dan melakukan evaluasi setelah kebijakan tersebut berjalan. Hal tersebut sangat berpengaruh dalam berkembangnya disiplin ilmu administrasi publik dengan lingkup analisis dan perumusan kebijakan (*Policy Analysis and Formulation*), implementasi dan pengendalian implementasi (*Policy Implementation*), serta melakukan *monitoring* dan memberikan evaluasi dari keberjalanan kebijakan tersebut (*Policy Evaluation*).

Administrasi Publik dapat diartikan bahwa, individu berperilaku sesuai peran dan jabatan resmi dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif, eksekutif, dan peradilan. Definisi menurut Gordon (1982) (dalam Kasim 1994), mengartikan bahwa administrasi publik terlibat dalam seluruh proses kebijakan publik. Dengan demikian, pendekatan administrasi publik di Indonesia berkaitan dengan peran birokrasi pemerintahan dalam melaksanakan berbagai kebijakan publik yang dapat mempengaruhi kinerja birokrasi dalam sistem administrasi publik secara keseluruhan. Administrasi Publik dalam *urban farming* dilihat dari bagaimana kebijakan ini di

implementasikan, dan bagaimana *stakeholder* melaksanakan tugasnya. *Stakeholder* yang berperan di sini adalah Dinas Pertanian Kota Semarang.

1.6.3 Paradigma Administrasi Publik

Paradigma merupakan sebuah konsep penjabaran suatu hal yang telah diterapkan para ahli dalam menjelaskan perkembangan sudut pandang ilmu pengetahuan dengan tujuan melakukan analisa pada kegiatan sosial yang sedang marak di masyarakat. Berikut merupakan penjelasan enam paradigma administrasi publik.

Paradigma I (1900-1926) atau sering diketahui sebagai Paradigma Dikotomi Politik dan Administrasi. Paradigma ini menjelaskan bahwa politik wajib memiliki fokus dalam lahirnya peraturan yang relevan bagi masyarakat serta pengamatan secara administratif dalam keberjalanan implementasi peraturan. Badan legislatif memiliki tujuan untuk menyalurkan aspirasi dari rakyat, badan eksekutif bertugas untuk mengimplementasikan aspirasi dari rakyat tersebut, dan badan yudikatif memiliki andil dalam membantu badan legislatif untuk membentuk sebuah kebijakan. Ketiga badan tersebut wajib berjalan secara beriringan agar tujuan rancangan kebijakan dapat tercapai.

Paradigma 2 (1927-1937) paradigma ini dapat juga dikenal dengan paradigma prinsip dasar Administrasi. Konsep prinsip dasar administrasi ini dikenalkan oleh Willoughby, Gullick, dan Urwick, yakni *Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, dan Budgeting*. Pada paradigma 2

dijelaskan bahwa administrasi publik memiliki fungsi serta prinsip manajemen, sedangkan pemaparan lokus tidak terpapar secara rinci.

Paradigma 3 (1950-1970) merupakan paradigma dari Administrasi Negara sebagai ilmu politik. Melalui paradigma ini berlanjut menjadikan keilmuan administrasi publik sebagai sebuah ilmu politik yang memiliki lokus pada birokrasi *stakeholder* dan sifat fokus yang abstrak karena prinsip dari administrasi publik memiliki ketidaksempurnaan.

Paradigma 4 (1956-1970) paradigma ini menjelaskan bahwa Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi. Paradigma 4 ini mengembangkan prinsip yang berfokus pada kegiatan berorganisasi, analisis manajemen, penerapan teknologi masa kini seperti metode kuantitatif, analisis sistem, penelitian operasi dan sebagainya. Pada paradigma 4 ini, perkembangan dibagi menjadi 2 arah, yaitu perkembangan ilmu administrasi secara murni yang diperkuat dengan disiplin psikologi sosial dan acuan dari kebijakan publik.

Paradigma 5 (1970-sekarang) yaitu paradigma Administrasi Negara dimana titik fokus dan lokusnya telah dijelaskan secara seksama. Fokus yang diberikan pada paradigma ini adalah perumusan teori organisasi, perumusan teori manajemen, dan perumusan kebijakan publik, sedangkan lokus dari paradigma ini adalah masalah dan kepentingan publik.

Paradigma 6 (1990-sekarang) atau dapat dikenal sebagai paradigma *Governance*. Paradigma ini menjadi suatu paradigma terbaru yang berlandaskan proses dari perkembangan keilmuan administrasi publik yang tersusun atas beberapa paradigma yang sebelumnya telah dipaparkan. Pergantian dari *government* ke arah *governance* menjelaskan perihal perpaduan di dalam keseimbangan pemerintahan, sektor swasta, dan sektor masyarakat madani. Paradigma ini memiliki arah perkembangan menuju pada sistem pemerintahan yang baik atau *good governance*.

Riset ini termasuk dalam lingkup bahasan pada paradigma 5 di mana ini menyangkut kebijakan publik. Tidak hanya pemerintah dan *stakeholder* terkait yang menjalankan kebijakan ini, tetapi dibutuhkan dukungan dari masyarakat agar program ini dapat efektif dan berhasil. Lokus dari Paradigma 5 adalah permasalahan dan kepentingan publik yang berarti dalam riset ini lahan sawah semakin mengalami penyusutan menjadi permasalahan dan *urban farming* sangat dibutuhkan karena menyangkut kepentingan publik. Fokus paradigma 5, yaitu kebijakan publik yang berarti Peraturan Walikota Semarang No. 24 Tahun 2021, kemudian teori organisasi yang berkaitan dengan *Stakeholder* dalam kebijakan ini yaitu Dinas Pertanian Kota Semarang.

1.6.4 Kebijakan Publik

Menurut Thomas R. Dye (1992), "*Public Policy is Whatever the Government Choose To Do or Not To Do*", yang berarti adalah kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dipilih atau tidak dipilih oleh pemerintah. Pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka artinya kebijakan publik tersebut memiliki tujuan karena kebijakan publik merupakan tindakan dari pemerintah. Kebijakan publik adalah pilihan tindakan yang legal dan sah karena dibuat oleh lembaga yang memiliki legitimasi dalam sistem pemerintahan. Kebijakan publik juga merupakan hipotesis yang dibuat berdasarkan teori, model atau hipotesis mengenai sebab dan akibat serta bersandar pada asumsi mengenai perilaku. Dalam penelitian ini, pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu yang artinya kebijakan publik tersebut memiliki tujuan. Jajaran Pemerintah Kota Semarang membuat Peraturan Walikota Semarang No. 24 Tahun 2021 yang memiliki tujuan untuk membudayakan gerakan pertanian perkotaan di Kota Semarang.

1.6.5 Implementasi Kebijakan

Menurut Nawawi (2009), implementasi dapat disebut sebagai suatu tahapan paling krusial dari sekian banyaknya tahapan dalam kebijakan publik. Praktik implementasi sering dipandang sebagai proses politis dan memiliki kompleksitas yang tinggi.

1. Van Meter dan Van Horn (1975) memandang implementasi kebijakan sebagai kegiatan yang dijalankan oleh individu, *stakeholder*, maupun kelompok pemerintah atau swasta untuk meraih tujuan tertentu.
2. Jones, berpendapat bahwa individu atau kelompok memiliki kecakapan untuk menciptakan suatu relasi sebagai rangkaian hubungan kausalitas yang menghubungkan tindakan dengan tujuan.
3. Grindle (dalam Winarno, 2008) berpandangan bahwa dalam proses pengimplementasian kebijakan, akan menciptakan rantai (*linkage*) yang memudahkan perealisasi tujuan kegiatan.
4. George C. Edward dalam pendekatan teorinya memiliki 4 indikator yang berpengaruh dalam kesuksesan suatu implementasi kebijakan, yakni faktor komunikasi, faktor sumber daya, faktor disposisi, dan struktur birokrasi.
5. Mazmanian dan Sabatier berpandangan bahwa dalam implementasi terdapat 4 indikator yang berpengaruh, yaitu kondisi sosial ekonomi, dukungan publik, dukungan badan berwenang, serta komitmen dan kemampuan pelaksana.

Berdasarkan definisi dari kutipan ahli di atas, disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah kegiatan suatu individu atau kelompok untuk meraih tujuan sebuah kebijakan. Implementasi memiliki tanggung jawab yang tidak hanya dibebankan kepada seorang individu atau kelompok terkait, tetapi juga menyangkut dengan jejaring kekuatan politik, ekonomi, serta sosial. Implementasi kebijakan memiliki 4 aspek yang perlu dikaji seperti yang dipaparkan oleh

Anderson (1979) di antaranya : implementor, hakikat kegiatan administrasi, ketaatan dan implikasi dari implementor. Dalam riset ini, peneliti memiliki acuan teori dari Edward III serta diselaraskan pada teori dari Mazmanian dan Sabatier dalam menggambarkan keberhasilan dalam implementasi Gerakan Pembudayaan Pertanian Perkotaan di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang. Teori Edward III yang memiliki 4 (empat) faktor dan teori Mazmanian Sabatier dengan 4 faktor yang dimiliki, relevan dengan 5 (lima) dimensi yang terdapat dalam Perwal Kota Semarang No. 24 Tahun 2021 mengenai Gerakan Pembudayaan Pertanian Perkotaan.

1.6.6 Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan suatu hal yang krusial karena banyak masalah yang datang di luar konsep awal. Implementor pada umumnya melibatkan banyak organisasi pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Jones (1996:166) mengatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu kegiatan untuk melaksanakan sebuah program dengan memperhatikan tiga aktivitas utama kegiatan, yaitu organisasi, interpretasi, dan aplikasi. Implementasi kebijakan memiliki dua pendekatan, yakni *bottom up* dan *top down*. Lester dan Stewartt (2000), menegaskan bahwa kedua pendekatan tersebut dapat dikatakan sebagai pendekatan *command and control* yang hampir sama dengan pendekatan *top down* yang sifatnya sentralistik, sedangkan pendekatan pasar sama dengan pendekatan

bottom up. Penelitian ini menggunakan pendekatan *top down* dan berikut salah satu teori ahli, yaitu model implementasi yang dikemukakan George C. Edwards III yang akan digunakan peneliti sebagai sandaran penelitian dan untuk memudahkan dalam memahami faktor apa saja yang dapat memengaruhi implementasi kebijakan. Dalam penelitian ini faktor pendorong menggunakan indikator dari Edwards (1980) dan Mazmanian Sabatier yang menjelaskan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh indikator berikut :

a) Komunikasi

Menurut Edward III (dalam Widodo, 2010:97), komunikasi dalam implementasi kebijakan meliputi beberapa dimensi, yakni transformasi, kejelasan, dan konsistensi. Implementor harus memahami apa yang akan dilakukan ke depannya agar kebijakan publik terealisasi. Implementor harus menginformasikan terhadap *target group* agar kebijakan yang dijalankan dan telah tersampaikan tidak menjadi persoalan. Implementor perlu melakukan perluasan komunikasi guna menghindari resistensi dari *target group*.

b) Sumber Daya

Kebijakan hanya akan menjadi wacana apabila kebijakan tersebut sudah terkomunikasikan dengan baik namun tidak diiringi dengan ketersediaan sumber daya. Efektivitas dan efisiensi suatu kebijakan ditunjang oleh sumber daya yang terdiri dari sumber daya anggaran, sumber daya peralatan, dan

terakhir sumber daya manusia. Edward III (dalam Widodo, 2010:98) mengatakan bahwa “*Probably the most essential resources in implementing policy is staff*”. Keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh sumber daya manusia. Edward III (dalam Widodo, 2010:100) menyatakan bahwa “*New towns studies suggest that the limited supply of federal incentives was a major contributor to the failure of the program*”. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan dapat dipengaruhi oleh sumber daya anggaran yang terbatas. Kebijakan tidak bisa berjalan optimal dan disposisi pelaku kebijakan menjadi rendah apabila anggaran menjadi hambatan. Edward III (dalam Widodo, 2010:102) menyatakan bahwa fasilitas atau sumber daya peralatan adalah sarana yang digunakan dalam operasionalisasi suatu kebijakan dan menjadi faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Oleh karena itu, sumber daya berperan penting dalam pelaksanaan kebijakan

c) Disposisi

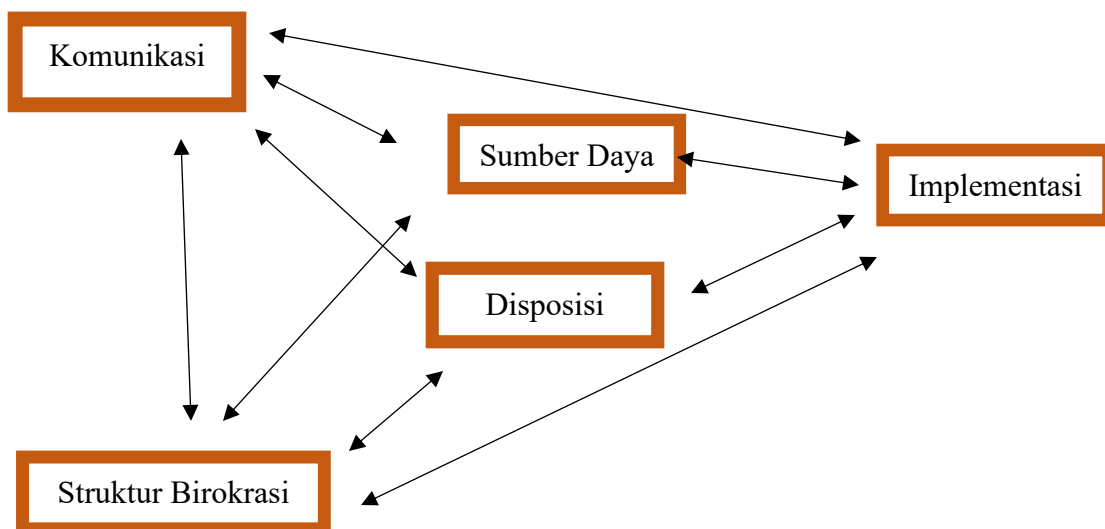
Disposisi merupakan karakteristik pelaksana kebijakan. Baik buruknya disposisi implementor akan berpengaruh terhadap proses dalam menjalankan kebijakan. Karakter yang harus dimiliki oleh implementor kebijakan misalnya kejujuran, komitmen yang tinggi, bertanggung jawab, dan saling mempercayai satu sama lain. Disposisi memiliki faktor-faktor yang turut mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu pengangkatan pelaksana dan insentif. Pada umumnya, pelaksana kebijakan adalah orang-orang yang berdedikasi tinggi pada kebijakan yang telah ditetapkan,

sedangkan insentif menjadi solusi untuk mencegah terjadinya permasalahan sikap seluruh pelaksana kebijakan.

d) Struktur Birokrasi

Konteks dari struktur birokrasi di sini merupakan seluruh bagian dalam struktur pemerintah maupun organisasi terkait dalam kebijakan yang ada. Edward III (dalam Winarno, 2005:150) mengatakan bahwa ada dua karakteristik utama, yakni struktur birokrasi wajib memiliki *Standard Operating Procedures* (SOP) yang menjadi acuan utama pelaksana kebijakan dalam melakukan tindakan agar tetap sesuai dengan tujuan kebijakan, dan fragmentasi yang berarti pendistribusian tanggung jawab. Bagan model George C. Edward III dijabarkan pada gambar 1.3 berikut.

Gambar 1. 3 Bagan Model George C. Edward III



e) Dukungan Publik

Mazmanian dan Sabatier menjelaskan bahwa dukungan publik menjadi indikator yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Keberhasilan implementasi kebijakan memerlukan dukungan penuh dari publik. Dukungan publik yang tidak maksimal akan menghambat keberjalanan dalam mencapai keberhasilan sebuah kebijakan.

Riset ini menggunakan Teori Edward III yang dipadukan dengan teori Mazmanian Sabatier karena dalam implementasi nya mencakup aspek komunikasi, aspek sumber daya, aspek disposisi, aspek struktur birokrasi, dan aspek dukungan publik. Terjadinya komunikasi mencakup Pemerintah Kota Semarang, Dinas Pertanian Kota Semarang, Kelompok Tani dan masyarakat. Sumber Daya mencakup sumber daya manusia, anggaran, serta fasilitas atau sarana prasarana yang dibutuhkan. Disposisi mencakup karakter dari implementor, yaitu Dinas Pertanian Kota Semarang dan Kelompok Tani. Dinas Pertanian Kota Semarang dan Kelompok Tani bekerja sama dengan baik dan memiliki karakter yang bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Struktur Birokrasi mencakup *Standard Operating Procedures (SOP)*. Struktur Birokrasi di sini mengacu pada SOP yang ada dan sudah ditaati baik oleh Dinas Pertanian Kota Semarang ataupun Kelompok Tani, misalnya dalam pengajuan proposal fasilitasi, melaksanakan sosialisasi, pelatihan dan kegiatan lain harus sesuai dengan SOP yang ada. Dukungan Publik mencakup kelompok tani atau masyarakat umum yang ikut serta

mendukung implementasi Gerakan Pembudayaan Pertanian Perkotaan. Pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa, implementasi kebijakan merupakan sebuah proses pelaksanaan kebijakan berupa tindakan nyata baik dari perseorangan, pejabat pemerintah ataupun privat, untuk mencapai tujuan kebijakan dan memunculkan dampak atau hasil nyata dari pelaksanaan kebijakan terhadap sasaran utama kebijakan, yaitu masyarakat.

1.6.7 Peraturan Walikota Semarang No. 24 Tahun 2021

Peraturan Walikota Semarang No. 24 Tahun 2021 diterbitkan secara khusus untuk mengatur tentang Gerakan Pembudayaan Pertanian Perkotaan di Kota Semarang. Peraturan ini mengacu pada peraturan yang lebih tinggi seperti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Beberapa tujuannya menurut Peraturan Walikota Semarang Nomor 24 Tahun 2021 Bab I Pasal 3 antara lain :

- a. Untuk pemberdayaan masyarakat dalam rangka memperkuat ketahanan pangan dan gizi;
- b. Memanfaatkan lahan dan / atau ruang;
- c. Menciptakan lingkungan yang sehat; dan / atau
- d. Meningkatkan penghijauan serta pemanfaatan limbah rumah tangga.

Pemerintah Kota Semarang dalam melakukan gerakan pembudayaan pertanian perkotaan melakukan pembinaan dan koordinasi dengan instansi terkait, pelaku usaha, serta pihak akademisi. Kegiatan tersebut meliputi sosialisasi, edukasi, konsultasi, pelatihan, promosi, dan / atau pelayanan kunjungan lokasi. Teori di atas menjelaskan bahwa implementasi tidak akan berhasil jika dilakukan secara individu. Sesuai dengan Bab II Pasal 7 ayat (1), sasaran gerakan pembudayaan pertanian perkotaan masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi perorangan, kelompok, komunitas, lembaga kemasyarakatan dan organisasi sosial. Sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) masyarakat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berperan aktif melakukan kegiatan pertanian perkotaan meliputi :

- a. Berperan aktif dalam pemanfaatan lingkungan sekitar untuk kegiatan pertanian perkotaan ; dan
- b. Melakukan pengembangan kegiatan pertanian perkotaan yang berkelanjutan.

Sesuai dengan pasal 5 huruf b, fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah untuk pertanian perkotaan dapat diberikan melalui dinas dan berupa bibit dan / atau alat peraga. Fasilitasi juga diberikan berdasarkan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas.

1.7 Operasionalisasi Konsep

Implementasi Kebijakan merupakan sebuah aktivitas baik dilakukan secara individu ataupun kelompok untuk mencapai suatu tujuan dalam sebuah kebijakan

yang ada. Implementasi Kebijakan dipengaruhi oleh 4 faktor, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Berdasarkan teori Edward III, implementasi kebijakan akan dilihat dari faktor :

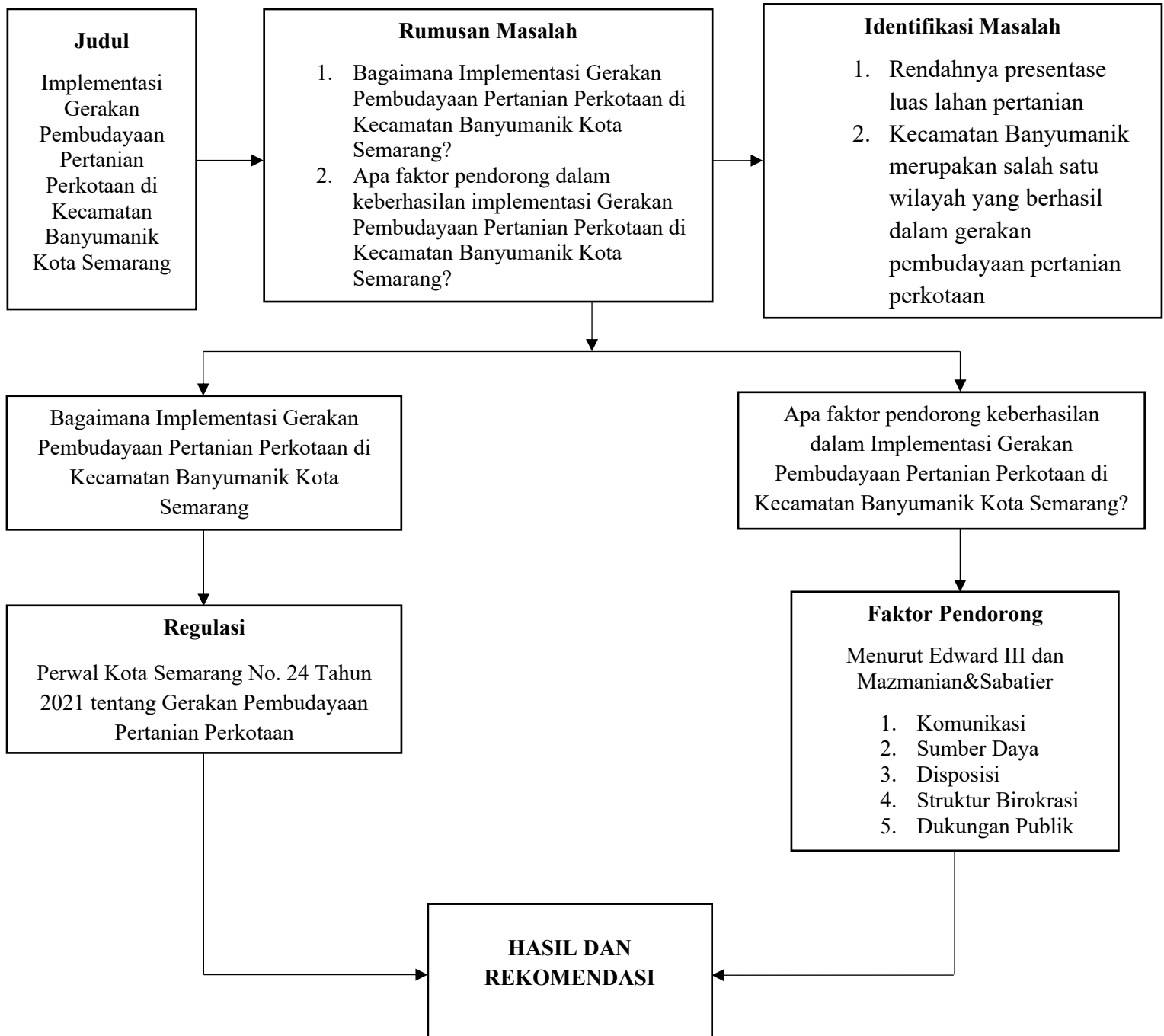
1. Komunikasi, yang dimaksud adalah bahwa implementor perlu mengetahui betul apa yang harus dilakukan. Implementor juga harus memastikan bahwa arus komunikasi kepada *target group* tersampaikan agar mencegah dan mengurangi distorsi implementasi.
2. Sumberdaya, berkaitan dengan penunjang keberhasilan implementasi kebijakan yang mana menyangkut sumber daya manusia (kompetensi implementor) dan sumber daya non manusia (finansial dan fasilitas).
3. Disposisi, dalam hal ini berbicara mengenai watak pelaksana kebijakan. Peraturan Walikota Semarang No. 24 Tahun 2021 akan berjalan baik jika implementor berdisposisi baik.
4. Struktur Birokrasi, yaitu keterlibatan seluruh institusi atau organisasi yang dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam implementasi kebijakan, salah satu faktor yang memiliki pengaruh penting adalah struktur birokrasi. Edward mengemukakan bahwa dalam struktur birokrasi terdapat aspek *Standars Operating Procedures* (SOP).
5. Dukungan Publik, yaitu seluruh aspek non pemerintah yang ikut memberikan dukungan untuk mencapai keberhasilan kebijakan.

Tabel 1. 3

Operasionalisasi Konseptual Model Edward III

Faktor	Indikator
Komunikasi	a. Sosialisasi Program b. Koordinasi lintas elemen
Sumber Daya	a. Tingkat kualitas dan keterisian sumber daya manusia / staff b. Ketersediaan fasilitas c. Kekuatan dana
Disposisi	a. Karakter pelaksana : komitmen, kejujuran, komunikatif, dan demokratis.
Struktur Birokrasi	a. Ketersediaan <i>Standars Operating Procedures</i> (SOP) b. Fragmentasi

1.8 Kerangka Pemikiran Teoritis



1.9 Metodologi Penelitian

Hakikatnya, metode penelitian adalah tahapan atau cara ilmiah bertujuan untuk memperoleh data dengan tujuan atau kegunaan tertentu (Sugiyono, 2015).

1.9.1 Desain Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi gerakan pembudayaan pertanian perkotaan secara menyeluruh agar masyarakat mendapat penjelasan secara mendalam. Tujuan ini sejalan dengan tipe rumusan masalah deskriptif sehingga tipe penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Pemilihan tipe ini dilakukan karena gambaran jelas mengenai fenomena yang telah ada sehingga tidak memenuhi kriteria penelitian eksploratif. Kemudian penelitian ini tidak bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat dari fenomena seperti pada tipe eksplanatif.

1.9.2 Lokus dan Fokus Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini berada di Kecamatan Banyumanik. Fokus penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi apakah implementasi gerakan pembudayaan pertanian perkotaan dari Dinas Pertanian Kota Semarang sekaligus Kelompok Tani sebagai kelompok sasaran.

1.9.3 Subjek Penelitian

Pada penelitian kualitatif tidak ada istilah populasi melainkan situasi sosial yang turut mencakup seluruh elemen yang membentuk situasi sosial tersebut

secara konstruktif. Terdapat tiga elemen dalam situasi sosial yang terdiri dari *Place* atau tempat, *Actors* atau pelaku, dan *Activity* atau aktivitas. Istilah sampel juga tidak digunakan dalam penelitian kualitatif karena subjek maupun objek dalam penelitian sifatnya memberikan informasi sehingga disebut sebagai narasumber, partisipan, ataupun informan. Subjek dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Pegawai Dinas Pertanian Kota Semarang
- b. Kelompok Tani Kecamatan Banyumanik Kota Semarang

1.9.4 Jenis dan Sumber Data

Data dalam penelitian merupakan data empiris yang memenuhi kriteria sebagai data yang valid. Validnya suatu data menggambarkan ketetapan antara data dengan realitas sosial yang sesungguhnya terjadi. Reliabilitas data menunjukkan konsistensi data dalam jangka waktu tertentu. Mudahnya dalam aktivitas manusia maka realibilitas sering dikaitkan dengan rutinitas. Sementara obyektivitas merupakan *interpersonal agreement* atau kesepakatan mayoritas orang.

Konsistensi dan kesepakatan mayoritas tidak lantas menghasilkan data yang valid atau benar-benar terjadi. Oleh karena itu data yang valid sifatnya pasti reliabel dan obyektif, sedangkan data yang reliabel dan obyektif belum tentu valid. Sumber data dibagi menjadi dua, yakni data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan, diberikan, atau disampaikan secara langsung

kepada peneliti, sedangkan data sekunder tidak melalui sumber data secara langsung melainkan melalui media perantara. Data primer dan sekunder pada penelitian kualitatif dapat diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumen, serta audio dan visual (dalam Creswell, 2017; Sugiyono, 2013). Observasi, wawancara, audio, dan visual merupakan teknik pengumpulan data yang dapat menghasilkan data primer. Sementara pengumpulan dokumen, audio, dan visual menjadi teknik pengumpulan data untuk memperoleh data sekunder.

1.9.5 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, pengumpulan data akan dilakukan dengan *qualitative interview*, *qualitative documents*, *qualitative observation*, dan *qualitative audio and visual materials*. Kemudian melalui informan yang akan dipilih nanti, akan diperoleh informan lain yang disebut sebagai pemilihan *snowball*. Pemilihan teknik *snowball* ini bertujuan untuk mendapatkan informasi baru apabila tidak ada informasi baru yang diperoleh lagi. Pencarian informan akan dihentikan apabila data telah diperoleh secara tuntas.

1.9.6 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk menjelaskan fenomena sosial yang diamati. Instrumen penelitian dalam metode kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Penulis dalam penelitian ini sebagai pembuat rencana, melakukan penelitian, mengumpulkan dan menganalisis data, serta melaporkan

penelitian. Dalam pelaksanaan penelitian, penulis menggunakan alat bantu seperti pedoman wawancara dan perekam suara.

1.9.7 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data dilakukan untuk mengolah data agar dapat menjawab rumusan masalah penelitian. Pengolahan data perlu dilakukan karena terdapat perolehan data yang cukup banyak di lapangan, hal tersebut diharapkan dapat menghasilkan interpretasi yang baik dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan analisis data yang dikemukakan oleh Miles & Huberman (2007) yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1.9.8 Kualitas dan Validitas Data

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi untuk menguji keabsahan data. Wiersma (dalam Sugiyono, 2020) menjelaskan triangulasi sebagai proses validasi silang kualitatif untuk menilai kecukupan data sesuai dengan konvergensi berdasarkan beberapa sumber data maupun beberapa prosedur pengumpulan data. Data yang diperoleh dari berbagai sumber bisa diuji kredibilitasnya dengan menggunakan triangulasi. Kedua, triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dari sumber yang sama menggunakan teknik berbeda. Triangulasi teknik umumnya digunakan untuk mengidentifikasi kebenaran pernyataan informan dalam wawancara dengan kenyataan melalui observasi. Ketiga, triangulasi waktu yang dilakukan untuk menguji kredibilitas

data pada waktu dan situasi yang berbeda secara berulang untuk mendapatkan kepastian data. Pengujian ini tidak dilakukan dengan menyamaratakan melainkan mendeskripsikan satu per satu data untuk kemudian diidentifikasi mana data yang menghasilkan kesamaan makna ataupun pandangan.